**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DIKAITKAN
DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Oleh: Wiby Fitria Alda

Program Studi: Hukum Pidana

Pembimbing 1 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Elmayanti, S.H., M.H

Alamat : Jln. Letjen S Parman Gang Syempama No.10B, Pekanbaru

Email : wibyfitriaalda22@gmail.com- Telepon : 082290203501

ABSTRACT

Criminal law policy in the press is still a problem for the press and society. The absence of regulations governing clear criminal sanctions against criminal acts of defamation committed by the press in Law No. 40 of 1999 concerning the current press. Currently, they still use regulations from other laws such as the Criminal Code, the Information and Electronic Transactions Law of 2016. The sanctions for criminal defamation vary in each regulation. So that there is no legal certainty for the press and the public. So that there will be no more debates between the press and the public if problems occur between them, it can be resolved according to the law per situ itself and provide legal certainty for Law No. 40 of 1999 About the Press. So that the creation of justice in society.

This research uses the typology of normative legal research or also called doctrinal legal research, which more specifically discusses legal principles. In this study the author uses the nature of descriptive research, because the author describes the Criminal Law Policy Against the Crime of Defamation in Law. No. 40 of 1999 About the Press Related to the Principle of Legal Certainty.

The results of the research conducted by the author, Law No. 40 of 1999 concerning the Press which should be supplemented with regulations in it such as regulations governing criminal defamation carried out by the press and what are the sanctions so that it can be said to be a lex specialist and give effect. deterring press people who are not professional in carrying out their duties. The criminal law policy given to the people of the press aims to maintain order in society and improve the personality of the perpetrator. The government should make the formulation of criminal sanctions in the current press law that can be applied. and Judges are judges in sanctions against press offenses to put more emphasis on the press law.

Keywords: Criminal Law Policy - Press - Crime - Defamati

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan).¹ Secara khusus undang-undang pers tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang delik-delik pers. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditemukan beberapa aturan yang dapat dikategorikan sebagai delik pers. Delik-delik tersebut yaitu: delik penghinaan, delik penyebaran kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi.

Tidak ditemukannya aturan tentang delik-delik tersebut membuka peluang untuk diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penyelesaian sengketa pers dengan orang atau badan hukum yang diberitakan. Pekerjaan jurnalis pada hakekatnya mewartakan peristiwa dengan kejadian faktual sehingga jelas unsur beritanya (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana lazim disebut 5W+1H).²

Pencemaran nama baik atau menista orang lain apabila ditinjau dari undang-undang pers belum mengakomodir mengenai permasalahan tersebut. Di dalam undang-undang pers sendiri hanya diatur mengenai sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh undang-undang sesuai Pasal 18 ayat (2) undang-undang pers.

Kebebasan pers yang bertanggung jawab merupakan prasyarat utama bagi sebuah negara dalam memperjuangkan kemajuan bangsa dan rakyatnya. Mengenai kebebasan pers tersendiri, hal tersebut telah diakomodasi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen yaitu diatur dalam Pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya, di tetapkan undang-undang”.³

Dengan adanya kebebasan pers suatu tulisan dalam media massa dapat menimbulkan tanggapan bermacam-macam. Pro atau kontra kerap terjadi. Dilemma antara penegakan hukum dan keadilan, baik terhadap kerugian subjek pemberitaan baik individu ataupun masyarakat akibat pemberitaan pers dan juga bagi pers adalah deskripsi betapa sulitnya tercapai penegakan hukum dan rasa keadilan masing-masing terhadap pihak bersengketa.⁴

Contoh perkara kasus tindak pidana pers yang diselesaikan dengan menggunakan KUHP dan tidak diselesaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu terdapat dalam putusan No. 87/pid.b/2011/PN-IDI. Bahwa pada intinya atas nama Basri Bin Razali (terdakwa) yang berprofesi sebagai wartawan dari tabloid MAPIKOR telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Amir Dahyar, SH dan Muhammad Daud (alm). Basri membuat sebuah artikel mengenai eksekusi tanah itu dengan judul : “ PN Idirayelik, Aceh Timur penganut peradilan sesat oknum panitera PN Idiraleyik double job mafia tanah”. Andi Gunawan yang tidak terima nama ayahnya dicemarkan melaporkannya ke Polres Aceh Timur dengan tuduhan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP. Singkatnya terdakwa di jatuhi

¹Bambang Eko Moeljono, “Perlindungan Hukum Wartawan Terhadap Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik Dilapangan, Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers”, *Jurnal Independen*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, vol.5, No. 2 2017, hlm.57.

²P. Hasudungan Sirait, *Jurnalisme Sadar Konflik*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta:2007, hlm. 258.

³Ahmad Irzal Fardiansyah, “Persoalan Yuridis Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universita Syiah kuala, No. 60, Th.XV, Agustus 2013, hlm. 358.

⁴*Ibid.* hlm. 35.

hukuman dengan pidana penjara selama 6 bulan.⁵

Kasus pencemaran nama baik lainnya yaitu Koh Seng Seng dan Winny Kwee, pengembang ITC Mangga Dua PT Duta Pertiwi Ke Mabes Polri pada November 2006 lalu, karena menulis surat pembaca di *Kompas*. Koh dan Kwee keduanya adalah pemilik kios di ITC Mangga Dua mengeluhkan tindakan perusahaan yang menjual kios-kios padanya, tetapi jenis tingkat pemilikannya berbeda dari apa yang seharusnya mereka terima. Mereka kemudian di tuntutan oleh penguat tersebut berdasarkan Pasal 311 KUHP. Kasus-kasus ini juga menyoroti ketidakonsisten sistem peradilan kasus seperti ini. Kwee dinyatakan tidak bersalah sedangkan koh didenda Rp 1 miliar. Dewan pers meminta polisi untuk tidak meneruskan kasus ini dengan alasan bahwa surat kepada redaksi termasuk sebagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Bukan berarti kemerdekaan pers adalah identik dengan merdeka dari tanggung jawab hukum dan etika profesi. koridor hukum dan etika profesi sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan pers dan masyarakat yang seimbang dan adil dengan kepentingan masyarakat.⁶

Sementara disisi lain persepsi seseorang atau sekelompok orang sebagai objek atau sumber berita tidak sama. Suatu pemberitaan dapat dinilai mencemarkan nama baik, memfitnah, diancam dengan ketentuan pidana menurut seseorang, tetapi belum tentu pandangan itu sama dengan orang lain. Hal tersebut juga membawa akibat pada bagaimana mekanisme sengketa penyelesaian sengketa akan ditempuh. Baik melalui mekanisme hak jawab atau melalui

upaya hukum hingga mengadukan kepada lembaga Dewan Pers.

Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan yang peneliti ingin teliti karena undang-undang khusus yang sudah dibuat namun tidak bisa ditetapkan sebagai acuan penegakan hukum. Tidak adanya kepastian hukum yang jelas terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi perdebatan secara terus menerus sehingga di butuhnya kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam kasus pers agar terlaksanakannya keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 40 tentang Pers dikaitkan dengan asas kepastian hukum?
2. Bagaimanakah kepastian hukum Undang-Undang No. 40 tentang Pers terhadap jaminan kemerdekaan pers di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers.
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers terhadap jaminan kemerdekaan pers di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum

⁵[https:// Putusan.Mahkamahagung.go.id](https://Putusan.Mahkamahagung.go.id), diakses, tanggal, 30 Oktober 2019.

⁶ Wikrama Iryans Abisin, *Politik Hukum Pers Indonnesia*, PT Grasindo, Jakarta:2005, hlm.38.

Universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam kebijakan hukum pidana terhadap pers.

- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda) . dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” inii sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*” atau “*strafrechts politiek*”.⁷ Menurut Marc Ancel kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁸

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah termasuk penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan

perundang-undangan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan tujuan umum yang mengharap pada upaya dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat dengan demikian kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan bertindak atau kebijakan dari Negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan terutama dalam menanggulangi kejahatan. Politik hukum adalah suatu bidang studi hukuk, yang kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.⁹

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, disamping yang lain yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan lain tanpa membedakan dimana asal usul dari man dia berada.¹⁰

Menurut Budiman Ginting, kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum.¹¹

Algra mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan kepastian mengenai hak dan kewajiban serta mengenai apa yang menurut hukum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Bagi suatu negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara.¹²

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.26.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.3.

⁹ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok: 2018, hlm. 204.

¹⁰ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 15.

¹¹ *Ibid*. hlm. 16.

¹² *Ibid*, hlm. 61.

E. Kerangka Konseptual

1. Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹³
2. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang terang supaya hal hal itu diketahui umum.
3. Kebijakan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁴
4. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya peraturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁵

¹³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm.3.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta : 2008, hlm. 109.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas merupakan suatu penelitian filosofis karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.¹⁶ Asas yang peneliti gunakan yaitu asas kepastian hukum. Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Infomarsi dan Elektronik
- 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

b) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang,

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.hlm. 74.

hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membaca catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif dapat di analisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya data dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Sedangkan analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Menarik kesimpulan dalam penelitian ini digunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Pers di Indonesia

1. Sejarah Pers di Indonesia

Pers pada masa Orde Lama terbagi menjadi dua periode, yakni periode Demokrasi Liberal dan periode Demokrasi Terpimpin. Pers pada masa Demokrasi

Liberal merupakan suatu masa di mana pers di Indonesia mengalami kebebasan yang begitu besar. Setiap orang yang memiliki modal dapat memiliki sebuah surat kabar sehingga bebas untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa harus terlebih dahulu mengurus perizinan. Pers pada masa ini umumnya mewakili aliran-aliran politik yang banyak bertentangan bahkan disalahgunakan untuk menebar fitnah, mencaci maki, menjatuhkan martabat seseorang atau keluarga, tanpa memikirkan ukuran sopan-santun dan tatakrama.

Era Orde Baru adalah suatu periode politik sejak tahun 1966 di bawah kepemimpinan Jendral Soeharto (11 Maret 1966) hingga kejatuhannya (21 Mei 1998). Era politik di bawah kepemimpinan soeharto itu disebut sebagai konfigurasi atau sistem politik Orde Baru, sedangkan era politik Pasca-Orde Baru yang berlangsung hingga sekarang disebut sebagai konfigurasi atau sistem politik Reformasi. Pada masa orde baru dilihat dari sudut pers, adalah terbukanya peluang pers untuk praktik kehidupan pers merdeka sehingga dapat memberikan informasi berdasarkan fakta benar dan aktual, serta melakukan koreksi terhadap pemerintah agar tidak tergelincir kembali ke rezim otoriter seperti yang terjadi pada rezim sebelumnya.¹⁷

2. Definisi Pers

Secara hukum nasional dan hukum positif indonesia, pers diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada pasal 1 angka 1 pers didefinisikan sebagai Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk

¹⁷ Satya Arinanto, *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta:2005, hlm.124.

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Prof. Oemar Seno Adji mendefinisikan pers dalam dua ruang lingkup yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas yaitu:¹⁸

- a. Pers dalam arti sempit mengandung di dalamnya penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan jalan kata tertulis.
- b. Pers dalam arti luas memasukkan didalamnya semua massa media komunikasi yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pers diartikan:
 - 1) Usaha percetakan dan penerbitan.
 - 2) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita.
 - 3) Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio.
 - 4) Orang yang bergerak dalam penyiaran berita.
 - 5) Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

3. Makna Kemerdekaan Pers

Landasan hukum bagi kemerdekaan dan kebebasan pers tertuang dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi:¹⁹

- a) Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
- b) Pasal 4 Ayat (1): Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- c) Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan

penyesoran, pemredelan atau pelarangan penyiaran.

- d) Pasal 4 Ayat (3): Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan meyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-undang yang sama juga menjelaskan adanya ancaman hukuman bagi siapapun yang menghalangi kemerdekaan pers, seperti yang tuangkan dalam Pasal 18 Ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

4. Asas dan Fungsi Pers

Pers dijalankan dengan pedoman pada kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Asas pers tersebut berkolerasi dengan fungsi pers.²⁰

Menurut Widodo, fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-macam yakni :²¹

1) *To Inform*

Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat pers memberikan informasi yang beraneka ragam.

2) *To Educate*

Pers berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya, pers bisa mendidik masyarakat pembacanya.

3) *To Controle*

Pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan

¹⁸ Abdul Fatah, *Hukum Pers Indonesia*, Setara Press, Malang:2019, hlm.1.

¹⁹ Irmansya syariar, *Hukum Per*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta:2015, hlm.99.

²⁰ Abdul Fatah, *Hukum Pers Indonesia*, Setara Press, Malang:2019, hlm.3.

²¹ Dahlan Surbakti. "Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya". *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2015, hlm.80.

oleh sebagian kelompok masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah.

4) *To Bridge*

Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada, bisa disampaikan lewat pers.

5) *To Entertain*

Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari sugurkan pers. Pers diperlukan sesuai dengan fungsinya, baik bagi seseorang, organisasi, lembaga maupun institusi, tidak hanya untuk memperoleh informasi tetapi lebih dari itu karena pers dapat membentuk opini masyarakat.

5. Hak dan Kewajiban Pers

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan Pasal 5, pers mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak pers adalah sebagai berikut:²²

- 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, *pembredelan* atau pelarangan penyiaran.
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- 4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Sedangkan kewajiban pers sebagai berikut:

- 1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah.

- 2) Pers wajib melayani hak jawab.

- 3) Pers wajib melayani hak tolak.

B. Tinjauan Umum Tentang Norma Hukum yang Berkaitan Dengan Pers

1. DUHAM dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik 1996

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights atau disingkat DUHAM disetujui dan diumumkan PBB lewat resolusi 271 A (III). DUHAM dianggap sebagai ideologi universal pertama di dunia. Sebelumnya, ideologi agama, politik, filsafat, ekonomi, dan kebudayaan memiliki penganut di berbagai bagian dunia.

Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi. Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang hak asasi manusia dan di dalamnya termuat 30 pasal. Deklarasi ini kemudian mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrumen hak asasi manusia di tingkat regional, konstitusi masing – masing negara, dan UU di masing – masing negara yang terkait dengan isu – isu hak asasi manusia.²³

Berikut adalah rincian hak-hak sipil sebagaimana tercantum dalam UU No 12 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi terhadap kovenan internasional tentang hak sipil-politik sebagai berikut:²⁴

1. Pasal 6 Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya bagi anak di bawah 18 tahun).
2. Pasal 7 Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (termasuk tidak

²² Abdul Fatah, Hukum Pers Indonesia, Setara Press, Malang:2019, hlm.4.

²³ <https://icjr.or.id/tag/duham/>, diakses tanggal 24 Oktober 2020.

²⁴ <https://sbmi.or.id/?p=5679>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020.

diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa).

3. Pasal 8 Hak untuk tidak diperbudak (larangan segala bentuk perbudakan, perdagangan orang, dan kerja paksa).

4. Pasal 9 Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (tidak ditangkap atau di-tahan dengan sewenang-wenang, didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana).

5. Pasal 10 Hak sebagai tersangka dan terdakwa (diperlakukan manusiawi, anak dipisahkan dari orang dewasa, sistem penjara bertujuan reformasi dan rehabilitasi).

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F

UUD 1945 Pasal 28 f : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

3. Tap MPR XVII 1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Piagam HAM jika dibandingkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 40 Tap MPR RI Nomor XVII/1998, terdapat kesamaan elemen.²⁵

a. Tap MPR RI Nomor XVII/1998 Pasal 20 berbunyi “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.

b. Tap MPR RI Nomor XVII/1998 Pasal 21 berbunyi “setiap orang berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.

5. Produk Hukum Pers

Hukum pers adalah salah satu bidang kajian ilmu hukum yang mempelajari tentang serangkaian kaidah, norma/aturan, aturan tentang pers. Secara khusus, pers diatur dalam undang-undang pers. Terdapat juga sejumlah aturan yang berhubungan dengan pers. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, KUHP, Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers tentang Hak jawab dan lain sebagainya.²⁶

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Rumusan Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan

²⁵ Wikrama Iryans Abisin, *Politik Hukum Pers*, PT Grasindo, Jakarta:2015, hlm.53.

²⁶ Abdul Fatah, *Hukum Pers Indonesia*, Setara Press, Malang:2019, hlm.8.

atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁷

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.²⁸

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “teore kenbaarheid”, atau “criminal responsibility”, atau “criminal liability”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku tindak

pidana yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁹

c. Sanksi pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan di jatuhkan itu dapat berupa:³⁰

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik

a. Rumusan tindak Pidana

Tindak pidana atau istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³¹ Tindak

²⁷ Erdianto Efendi, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

²⁸ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561016-3-BAB+II.pdf>. Diakses pada tanggal 2 November 2020.

²⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 250.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2014, hlm.117.

³¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta: 2012, hlm.12.

pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Namun beberapa kasus di Indonesia terkait pemberian kritik dan komentar berujung pada pemidanaan seseorang. pengaturan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik juga terdapat di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

B. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet dapat diterapkan berikut dengan sanksi pidana penjara maupun berupa denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan.

c. Sanksi Pidana

Sanksi atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU informasi elektronik diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama

Baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu diterapkan secara tegas dalam menegakkan dan memberikan kepastian hukum. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian selalu menggunakan KUHP bukan undang-undang pers itu sendiri. Sangat disayangkan KUHP dijadikan rujukan bagi pelapor dan jaksa di Indonesia. Kalangan pers menginginkan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pers menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kasus delik pers.

Menurut Moch Ali kaidah hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan undang-undang pers. Misalnya saja pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mengatur tentang apabila orang-orang di luar pers yang menghalangi kinerja pers akan ditindak secara pidana, sedangkan apabila pers sendiri yang melakukan pelanggaran maka undang-undang pers tidak mengatur masalah ketentuan pidananya.³²

Berkaitan dengan masalah kepastian hukum dalam penegakan hukum delik pers, munculnya ketidakadilan bagi pihak masyarakat maupun insan pers itu sendiri. Karena pers maupun masyarakat akan tetap bingung melihat peraturan mana yang harus mereka percaya dalam menyelesaikan perkara pers. Menurut Budiman Ginting, kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok,

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta: 2008, hlm.86.

maupun organisasi. Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum.³³

B. Kepastian Hukum Undang-Undang No. 40 tentang Pers Terhadap Jaminan Kemerdekaan Pers di Indonesia

Undang-undang Pers menyediakan mekanisme penyelesaian permasalahan pemberitaan pers yang timbul akibat wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan mekanisme pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Undang-undang Pers menegaskan bahwa pers wajib melayani hak jawab yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Jika tidak melayani Hak Jawab dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta). Undang-undang Pers juga wajib melayani hak koreksi yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.³⁴

Mengenai ketentuan pidana, dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 terdapat pada pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 ayat a dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan kata lain pasal-pasal tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada penulis/pelaku yang bersangkutan.

Konsep kemerdekaan pers dan kebebasan pers kerap dimaknai secara berbeda-beda antara masyarakat dan pers. Rumusan pasal 5 ayat (1) UU Pers sering dianggap terlalu luas untuk ditafsirkan secara hukum, dalam arti tidak memberikan penjelasan secara rinci atau

kriteria apa saja yang tergolong menghormati norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Masyarakat non pers tidak mendapatkan gambaran dan kepastian hukum tentang apakah tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, menyatakan permusuhan dan lainnya, termasuk pelanggaran oleh pers atau tidak. Sehingga pasal tersebut tidak jelas dan terlalu melindungi konsep kebebasan dan kemerdekaan pers.

Upaya dalam menanggulangi sumber daya manusia yang terbatas. Dalam menghadapi permasalahan ini, yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toba Samosir adalah dengan melakukan kerjasama dengan Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir. Dengan melakukan kerjasama tersebut maka akan sangat membantu penyidik dalam melakukan pengawasan dan penegakan.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan sisoalisasi dan edukasi kepada para agen dan pemilik pangkalan bahwa tindakan menaikkan harga diatas harga eceran tertinggi merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diteliti peneliti dapatkan mengenai kasus pencemaran nama baik oleh pers di dalam pengaturan Undang-Undang No. 40 tentang Pers yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 40 tentang Pers dikaitkan dengan asas kepastian hukum, belum memberikan kepastian

³³Ibid. hlm. 16.

³⁴Irman Syahriar, *Hukum Pers*, Laksbang Group, Samarinda:2015, hlm.158.

hukum yang jelas. Hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di dalam undang-undang pers. Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pihak pers, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, dengan adanya tujuan pemidanaan dapat mempertahankan tata tertib dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku.

2. Kepastian hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap jaminan kemerdekaan pers di Indonesia belum terlaksana sepenuhnya, hal tersebut dikarenakan penegak hukum belum menjadikan undang-undang pers ini sebagai *lex specialis* akhirnya kepastian hukum undang-undang ini menjadi tidak jelas. Formulasi sanksi pada undang-undang pers ini masih belum diatur dengan baik pada perturan-peraturannya terutama pada Pasal 5 ayat (1) yang harus di berikan kejelasan mengenai delik mengenai apa di dalam pasalnya belum memberikan penjelasan yang jelas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang No. 40 tentang Pers dikaitkan dengan asas kepastian hukum, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya mengkaji, meninjau kembali dan menyempurnakan Undang-Undang No. 40 tentang Pers dalam mengatur perkara yang menyangkut hukum pidana dan

memastikan dan mempertegas aturan pemidanaan yang jelas terhadap pers sebagai pelaku tindak pencemaran nama baik dan di harapkan pertanggungjawaban pers di masa yang akan datang jauh lebih kompleks di dalam penerapan hukum yang sesuai. Karena masyarakat semakin berkembang. Adanya kemajuan di bidang teknologi dan modus-modus baru akan terus bermunculan.

2. Ketika terjadi persengketaan dalam pemberitaan antara masyarakat dan pers maupun dengan pemerintah, hendaknya hakim menyelesaikan masalahnya melalui undang-undang pers. Pers hendaknya dapat lebih mengembangkan antara kebebasan dan tanggungjawab, harus dapat mengupayakan berita fakta sebagaimana diatur dalam undang-undang pokok pers dan Kode Etik Wartawan, dan kesalahan segera dilayani dengan pemenuhan hak jawab dan koreksi. Selain itu kedepannya pers harus lebih dewasa dalam setiap pemberitaannya tanpa harus memfitnah lembaga atau kepribadian seseorang. Hal ini harus dilakukan supaya ada kepastian Hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumnus, Bandung.
- Abidin, Wikrama Iryans, 2005, *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Adang, Yesmil Anwar, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasmarana Indonesia, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Albert Rumokoy, Donald dan Frans Maramis, 2014,

- Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Armansyah, 2015, *Pengantar Hukum Pers Gramata Publishing*, Bekasi.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arinanto, Satya, 2005, *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Asfar, Adib Muttaqin, 2012, *Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Jakarta.
- Aswani, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Grup, Depok.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fatah, Abdul, 2019, *Hukum Pers Indonesia*, Gramedia Publishing, Jakarta.
- Harymurti, Bambang, 2004, *Wartawan Menggugat*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta.
- Kansil dan Christine, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Karianga, Hendra, 2013, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta.
- Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Outsourcing*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Nurdin, Boy, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cet.4, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbitan Nusa Media, Bandung.
- _____, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Renggong, Ruslan, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta.
- Sirait, P. Hasudungan, 2008, *Jurnalis Sadar Konflik*, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cet ke-2, Yayasan Sudarto Fakultas Undip, Semarang.
- Syahriar, Irman, 2015, *Hukum Pers*, Laksbang Group, Samarinda.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Ahmad Irza Fardiansyah I, “ Persoalan Yuridis Undang-Undang No. 40/1999 Tentang Pers”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, No. 60, Th.XV, Agustus 2013, hlm. 358.
- Asnawi Murani. “Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.1, Nomor2, Desember, hlm.34.
- Ari Wibowo, “ Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang, Vol.7, No.1 2012.hlm.10.
- Bambang Eko Moeljono, “Perlindungan Hukum Wartawan Terhadap Tindak Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik Dilapangan, Menurut UU No. 40

- Tahun 1999 Tentang Pers”, Jurnal Independen, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, vol.5, No. 2 2017, hlm.57.
- Dedi Sahputra, “Implementasi Hukum Pers di Sumatra Utara”, Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Medan Area, vol.20 no. 2, Juni 2020. Hlm.261.
- Erdianto, “Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No.2 November 2010.hlm. 112.
- Haryati, “Sikap Pers terhadap Kondisi Keterpurukan Bangsa Indonesia”, Jurnal Komunikasi, MediaTor, Vol.4, No. 1 2003.hlm.43.
- Hana Silvana, “Peran Media Massa Pada Komunikasi Politik Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, UNIKOM, Vol. 01, 2013, hlm.3.
- Mompang L. Panggabean, “Mencari Sosok Hakim Indonesia Yang Ideal”, Jurnal Hukum Prioris, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol.3 No. 2 Tahun 2013, hlm.45.
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02, Juni 2016, hlm.193.
- Reza mertosono, “Pencemaran Nama Baik Kepada Seseorang Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-undang Pers Indonesia”, Lex Privatum, Vol.V, No.3, Mei 2017, hlm.32.
- Suhartanto, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 2, Desember 2017,hlm.112.
- W. E. Shipley, Criteria of jurisdictional amount in tort action for unliquidateddamages in federal court, West Law, Journal of American Law Reports, American, 1956, hlm 32, diakses melalui <https://.next.westlaw.com/search/home.htmlrs=UriauIndo> pada tanggal 27 Desember 2019.
- Wildan Muchladun, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Vol.3 Tahun 2015, hlm.3.
- Zelfi Alkatiri, “Multikultur dan Multiperspektif dalam HAM Internasional”, Jurnal Wacana, VOL. 8 No. 2, Oktober 2006, hlm. 188.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.40 tahun 1999 Tentang Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

D. Website

- [https:// Putusan.Mahkamahagung.go.id](https://Putusan.Mahkamahagung.go.id), diakses, tanggal, 30 Oktober 2019
- <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561016-3-BAB+II.pdf>., diakses, tanggal 25 September 2020.
- <https://sbmi.or.id/?p=5679> diakses, tanggal 8 November 2020.
- <https://icjr.or.id/kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses tanggal 24 Oktober 2020